



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-14.OT.01.02 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (triwulan) dan dilaksanakan oleh seluruh Divisi Kantor Wilayah.
- KEDUA : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
  2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
  3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Seluruh Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Kepala Divisi bertanggung jawab tentang pelaporan capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
  2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui link yang akan disampaikan kemudian;
  3. Seluruh Divisi menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
  4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
  5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilakukan setiap triwulan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Perjanjian Kinerja.
- KELIMA : Kepala kantor Wilayah akan memberikan sanksi apabila Kepala Divisi tidak melaksanakan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK  
NIP 196407011991031001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>													
1	Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Hasil Survei Integritas Internal Organisasi (Dirubah Kedalam Nilai Indeks)	1. Melaksanakan Layanan BMN 2. Melaksanakan Layanan Humas dan Informasi 3. Melaksanakan Layanan Protokoler 4. Melaksanakan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5. Melaksanakan Layanan Umum 6. Melaksanakan Layanan Perkantoran 7. Melaksanakan Layanan Sarana Internal 8. Melaksanakan Layanan Manajemen SDM 9. Melaksanakan Layanan Perencanaan dan Penganggaran 10. Melaksanakan Layanan Pemantauan dan Evaluasi 11. Melaksanakan Layanan Manajemen Keuangan 12. Melaksanakan Layanan Reformasi Kinerja 12. Melaksanakan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp23.674,161,000	Rp6,748,057,400	Rp -	TW I - Melakukan Survei Integritas Internal Organisasi - Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN - Melaksanakan Monitoring dan Pelaporan BMN - Melaksanakan Pengamanan BMN Satuan Kerja Wilayah - Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik - Melaksanakan Peliputan Kehumasan - Melaksanakan Keprotokoleran - Melaksanakan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ - Memenuhi Pengelolaan Kesehatan Pegawai - Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai - Memenuhi Kebutuhan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Melaksanakan Administrasi Kepegawaian - Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Bina Mental Pegawai, Penanganan Hudkdis, dan Pembinaan Kepegawaian) - Fasilitasi Penyusunan Krisna Renja Satker - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 - Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP Satuan Kerja - Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko Satuan Kerja - Fasilitasi Pelaksanaan SPIP - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2023 - Melaksanakan Rekonsiliasi Wilayah Semester II TA 2023 - Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan	TW I	- Hasil Survei Integritas Internal Organisasi - Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN - Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik - Laporan Peliputan Kehumasan - Laporan Keprotokoleran - Laporan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ - Laporan Pengelolaan Kesehatan Pegawai - Laporan Pelaksanaan Layanan Perkantoran - Laporan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Laporan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Krisna Renja Satker - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 - Laporan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian - Laporan Hasil Evaluasi Mandiri SAKIP - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Manajemen Risiko - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2023 - Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal Triwulan I - Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan I		
						Rp8,544,752,400	Rp -	TW II - Melakukan Survei Integritas Internal Organisasi - Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN - Melaksanakan Monitoring dan Pelaporan BMN - Melaksanakan Pengamanan BMN Satuan Kerja Wilayah - Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik - Melaksanakan Peliputan Kehumasan - Melaksanakan Keprotokoleran - Melaksanakan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan - Melaksanakan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ - Memenuhi Pengelolaan Kesehatan Pegawai - Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai - Memenuhi Kebutuhan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Melaksanakan Administrasi Kepegawaian (Pengadaan Calon Taruna) - Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Bina Mental Pegawai, Penanganan Hudkdis, Pembinaan Kepegawaian dan Bapperjakat) - Supervisi Pagu Indikatif di lingkungan Kantor Wilayah TA 2025 - Melakukan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Wilayah dan UPT - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2024 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I - Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko Satuan Kerja - Fasilitasi Pelaksanaan SPIP - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tingkat Wilayah TA 2024 - Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal - Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembentukan Satker WBK/WBBM - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Unit Pemberantasan Pungli - Fasilitasi Pembangunan Budaya Anti Korupsi - Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan	TW II	- Hasil Survei Integritas Internal Organisasi - Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN - Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik - Laporan Peliputan Kehumasan - Laporan Keprotokoleran - Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan - Laporan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ - Laporan Pengelolaan Kesehatan Pegawai - Laporan Pelaksanaan Layanan Perkantoran - Laporan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian - Laporan Pelaksanaan Supervisi Pagu Indikatif - Laporan Pelaksanaan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Wilayah dan UPT - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2024 - Laporan Pelaksanaan SPIP - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TW I Tingkat Wilayah TA 2024 - Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal -Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi -Lapran Pendampingan Pembentukan Satker WBK/WBBM - Laporan Kegiatan Penguatan/Sosialisasi UPP - Laporan Penguatan/Sosialisasi Pembangunan Budaya Anti Korupsi - Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan I			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
							Rp5,489,754,200	Rp -	TW III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Survei Integritas Internal Organisasi</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN</li> <li>- Melaksanakan Monitoring dan Pelaporan BMN</li> <li>- Melaksanakan Pengamanan BMN Satuan Kerja Wilayah</li> <li>- Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik</li> <li>- Melaksanakan Peliputan Kehumasan</li> <li>- Melaksanakan Keptokoleran</li> <li>- Melaksanakan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan</li> <li>- Melaksanakan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ</li> <li>- Memenuhi Pengelolaan Kesehatan Pegawai</li> <li>- Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai</li> <li>- Memenuhi Kebutuhan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> <li>- Melaksanakan Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Bina Mental Pegawai, Penanganan Hukdis, Pembinaan Kepegawaian)</li> <li>- Supervisi Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran TA 20215 di lingkungan Kantor Wilayah</li> <li>- Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I</li> <li>- Fasilitasi Penyusunan Rencana Penarikan Dana dan Kalender Kerja Pagu Alokasi Anggaran</li> <li>- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2024</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan SPIP</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tingkat Wilayah TA 2024</li> <li>- Melaksanakan Rekonsiliasi Wilayah Semester I TA 2024</li> <li>- Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan</li> </ul>	TW III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Survei Integritas Internal Organisasi</li> <li>- Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN</li> <li>- Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik</li> <li>- Laporan Peliputan Kehumasan</li> <li>- Laporan Keptokoleran</li> <li>- Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan</li> <li>- Laporan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kesehatan Pegawai</li> <li>- Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Laporan Lembur Pegawai</li> <li>- Laporan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</li> <li>- Laporan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Supervisi Pagu Anggaran</li> <li>- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2024</li> <li>- Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I</li> <li>- Laporan Pelaksanaan SPIP</li> <li>- Laporan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah Semester I TA 2024</li> <li>- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tingkat Wilayah TA 2024</li> <li>- Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal Triwulan III</li> <li>- Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan III</li> </ul>		
							Rp2,891,597,000	Rp -	TW IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Survei Integritas Internal Organisasi</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN</li> <li>- Melaksanakan Monitoring dan Pelaporan BMN</li> <li>- Melaksanakan Pengamanan BMN Satuan Kerja Wilayah</li> <li>- Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik</li> <li>- Melaksanakan Peliputan Kehumasan</li> <li>- Melaksanakan Keptokoleran</li> <li>- Melaksanakan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan</li> <li>- Melaksanakan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ</li> <li>- Memenuhi Pengelolaan Kesehatan Pegawai</li> <li>- Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai</li> <li>- Memenuhi Kebutuhan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> <li>- Melaksanakan Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Bina Mental Pegawai, Penanganan Hukdis, Pembinaan Kepegawaian)</li> <li>- Fasilitasi Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2025</li> <li>- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2024</li> <li>- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester II</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tingkat Wilayah TA 2024</li> <li>- Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan</li> </ul>	TW IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Survei Integritas Internal Organisasi</li> <li>- Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN</li> <li>- Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik</li> <li>- Laporan Peliputan Kehumasan</li> <li>- Laporan Keptokoleran</li> <li>- Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan</li> <li>- Laporan Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/ UKPBJ</li> <li>- Laporan Pengelolaan Kesehatan Pegawai</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Layanan Perkantoran</li> <li>- Laporan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Analisa Kebutuhan Anggaran</li> <li>- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2024</li> <li>- Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester II</li> <li>- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tingkat Wilayah TA 2024</li> <li>- Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan IV</li> </ul>		
<b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>													
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Jumlah PNPB Tahun Berjalan Dikurang Jumlah PNPB Tahun Sebelumnya Dibagi Jumlah PNPB Tahun Sebelumnya Dikali 100%	Melaksanakan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2,183,300,000	Rp1,156,562,000	Rp -	TW I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah</li> <li>- Melaksanakan Publikasi, Pameran dan Helpdesk</li> <li>- Melaksanakan Koordinasi Terkait Layanan AHU di Wilayah</li> <li>- Melaksanakan Layanan AHU Lainnya</li> </ul>	TW I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pelaksanaan Sosialisasi (Kenotariatan, Kewarganegaraan)</li> <li>- Laporan Hasil Pelaksanaan Publikasi</li> <li>- Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Terkait Layanan AHU (Perseroan Perorangan, ABGT, Apostille, PPNS, Fidusia)</li> <li>- Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan AHU Lainnya (Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan PPNS, Pelantikan Notaris, Layanan AHU Lainnya dan Migrasi Data Layanan AHU)</li> </ul>		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
							Rp 726,337,000	Rp -	TW II	- Melaksanakan Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Publikasi, Pameran dan Helpdesk - Melaksanakan Koordinasi Terkait Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Layanan AHU Lainnya	TW II	- Laporan Pelaksanaan Sosialisasi (Fidusia, Perseroan Perorangan) - Laporan Hasil Pelaksanaan Publikasi - Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Terkait Layanan AHU (Perseroan Perorangan, ABGT, Apostille, PPNS, Fidusia) - Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan AHU Lainnya (Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan PPNS, Pelantikan Notaris, Layanan AHU Lainnya dan Migrasi Data Layanan AHU)	
							Rp 177,096,000	Rp -	TW III	- Melaksanakan Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Publikasi, Pameran dan Helpdesk - Melaksanakan Koordinasi Terkait Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Layanan AHU Lainnya	TW III	- Laporan Pelaksanaan Sosialisasi (Fidusia, Perseroan Perorangan) - Laporan Hasil Pelaksanaan Publikasi - Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Terkait Layanan AHU (Perseroan Perorangan, ABGT, Apostille, PPNS, Fidusia) - Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan AHU Lainnya (Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan PPNS, Pelantikan Notaris, Layanan AHU Lainnya dan Migrasi Data Layanan AHU)	
							Rp 123,305,000	Rp -	TW IV	- Melaksanakan Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Publikasi, Pameran dan Helpdesk - Melaksanakan Koordinasi Terkait Layanan AHU di Wilayah - Melaksanakan Layanan AHU Lainnya	TW IV	- Laporan Pelaksanaan Sosialisasi (Kenotariatan, Kewarganegaraan) - Laporan Hasil Pelaksanaan Publikasi - Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Terkait Layanan AHU (Perseroan Perorangan, ABGT, Apostille, PPNS, Fidusia) - Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan AHU Lainnya (Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan PPNS, Pelantikan Notaris, Layanan AHU Lainnya dan Migrasi Data Layanan AHU)	
					Melaksanakan Penanganan Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	Rp 46,540,000	Rp 31,890,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Advokasi Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	TW II	Laporan Hasil Pelaksanaan Advokasi	
							Rp 1,050,000	Rp -	TW III	Melaksanakan Advokasi Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	TW III	Laporan Hasil Pelaksanaan Advokasi	
							Rp 13,600,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Advokasi Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	TW IV	Laporan Hasil Pelaksanaan Advokasi	
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	88%	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Dibagi Total Laporan Pengaduan Masyarakat Dikali 100%	Melaksanakan Pengawasan Kenotariatan Oleh Majelis Pengawas Di Wilayah	Rp 1,503,717,000	Rp 224,607,000	Rp -	TW I	Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan	TW I	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan MPW, MPD dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MKNW	
							Rp 292,588,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan	TW II	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan MPW, MPD dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MKNW	
							Rp 685,112,000	Rp -	TW III	Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan	TW III	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan MPW, MPD dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MKNW	
							Rp 301,410,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan	TW IV	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan MPW, MPD dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MKNW	
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Capaian Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 4 (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)	Menerima laporan aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 277,402,000	Rp 4,980,000	Rp -	TW I	- Melakukan Kooordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Korwas PPNS Polda - Melaksanakan kegiatan Edukasi/Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah - Meneruskan Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran HKI Kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa - Menjadi Saksi Ahli pada Persidangan Perkara Pelanggaran HKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	TW I	Laporan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	
							Rp 37,960,000	Rp -	TW II	- Melakukan Kooordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Korwas PPNS Polda - Melaksanakan kegiatan Edukasi/Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah - Meneruskan Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran HKI Kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa - Menjadi Saksi Ahli pada Persidangan Perkara Pelanggaran HKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	TW II	Laporan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	
							Rp 154,417,000	Rp -	TW III	- Melakukan Kooordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Korwas PPNS Polda - Melaksanakan kegiatan Edukasi/Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah - Meneruskan Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran HKI Kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa - Menjadi Saksi Ahli pada Persidangan Perkara Pelanggaran HKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	TW III	Laporan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
							Rp 80,045,000	Rp -	TW IV	- Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Korwas PPNS Polda - Melaksanakan kegiatan Edukasi/Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah - Meneruskan Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran HKI Kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa - Menjadi Saksi Ahli pada Persidangan Perkara Pelanggaran HKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	TW IV		Laporan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap KI di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI terhadap Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/ Edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah Peserta Diseminasi atau Edukasi yang Memahami KI di Wilayah Dibagi Jumlah Peserta Diseminasi atau Edukasi di Wilayah Dikali 100%	Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Merek Kolektif, Kekayaan Intelektual Komunal dan KI Lainnya	Rp 1,300,481,000	Rp 536,869,000	Rp -	TW I	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya Dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW I		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 328,840,000	Rp -	TW II	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya Dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW II		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 381,372,000	Rp -	TW III	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya Dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW III		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 53,400,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya Dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW IV		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	Jumlah Permohonan KI di Wilayah Tahun Berjalan Dikurang Jumlah Permohonan KI di Wilayah Tahun Sebelumnya Dibagi Jumlah Permohonan KI Di Wilayah Tahun Sebelumnya Dikali 100%	Penerimaan Permohonan Pendaftaran dan Pencatatan Kekayaan Intelektual melalui Operator Kantor Wilayah Termasuk Memproses Fasilitasi Pendaftaran Merek oleh Instansi Terkait	Rp 868,703,000	Rp 107,136,000	Rp -	TW I	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW I		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 499,041,000	Rp -	TW II	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW II		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 126,994,000	Rp -	TW III	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW III		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
							Rp 135,532,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pendampingan dan Kerjasama Dibidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM	TW IV		Laporan Pendampingan dan Kerjasama	
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	umlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Selesai Diharmonisasi Oleh Kantor Wilayah Dibagi Total Permohonan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dikali 100%	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 502,153,000	Rp 188,504,000	Rp -	TW I	- Pelaksanaan Persiapan Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah - Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah - Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke DKI Jakarta	TW I		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
							Rp 172,920,000	Rp -	TW II	- Pelaksanaan Persiapan Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	TW II		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
							Rp 104,229,000	Rp -	TW III	- Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah - Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah - Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke DKI Jakarta	TW III		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
							Rp 36,500,000	Rp -	TW IV	- Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah - Penyusunan Laporan	TW IV		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
7	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang Mendapat Pembinaan pada Tahu Berjalan	Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Rp 36,966,600	Rp 12,850,000	Rp -	TW I	Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	TW I		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi	
							Rp 7,000,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	TW II		Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi	
							Rp -	Rp -	TW III		TW III			
							Rp 17,116,600	Rp -	TW IV	- Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke DKI Jakarta - Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	TW IV		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
8	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Jumlah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelaporan Aksi HAM	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp 192,190,000	Rp 35,960,000	Rp -	TW I	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	TW I		Laporan Koordinasi dan Konsultasi	
							Rp 40,855,000	Rp -	TW II	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	TW II		Laporan Koordinasi dan Konsultasi, Surat Capaian Aksi HAM B04	
							Rp 72,990,000	Rp -	TW III	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	TW III		Laporan Koordinasi dan Konsultasi Surat Capaian Aksi HAM B08	
							Rp 42,385,000	Rp -	TW IV	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	TW IV		Laporan Koordinasi dan Konsultasi, Laporan Evaluasi B12	
		Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	Jumlah Kabupaten/Kota yang meraih Predikat Peduli HAM	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Rp 53,890,000	Rp 26,320,000	Rp -	TW I	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW I		Laporan Pengumpulan Data dan Pendampingan	
							Rp 17,090,000	Rp -	TW II	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW II		Laporan Pengumpulan Data dan Pendampingan	
							Rp 9,970,000	Rp -	TW III	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW III		Laporan Pengumpulan Data dan Pendampingan	
							Rp 510,000	Rp -	TW IV	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW IV		Laporan Pengumpulan Data dan Pendampingan, Laporan Evaluasi	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah instansi Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	Rp 44,480,000	Rp 19,270,000	Rp -	TW I	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	TW I	Laporan Pencanangan P2HAM	
						Rp 8,130,000	Rp -	TW II	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	TW II	Laporan Pendampingan dan Monev P2HAM		
						Rp 10,480,000	Rp -	TW III	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	TW III	Laporan Pendampingan dan Monev P2HAM		
						Rp 6,600,000	Rp -	TW IV	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	TW IV	Laporan Evaluasi		
9	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah Pengaduan/Informasi Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti dan Didorong Penyelesaiannya	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rp 75,010,000	Rp 14,530,000	Rp -	TW I	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	TW I	Laporan Fasilitasi dan Surat Koordinasi / Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	
						Rp 39,980,000	Rp -	TW II	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	TW II	Laporan Fasilitasi dan Surat Koordinasi / Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM		
						Rp 16,980,000	Rp -	TW III	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	TW III	Laporan Fasilitasi dan Surat Koordinasi / Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM		
						Rp 3,520,000	Rp -	TW IV	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	TW IV	Laporan Fasilitasi dan Surat Koordinasi / Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM		
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Perda	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Terkait Rekomendasi AE	Melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	Rp 50,498,000	Rp 2,514,000	Rp -	TW I	Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	TW I	Laporan Kegiatan Rapat Persiapan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	
						Rp 42,759,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	TW II	Laporan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah		
						Rp 5,225,000	Rp -	TW III	Menyusun Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	TW III	Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah		
						Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV	-		
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Rancangan Perda	Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Perda	Rp 69,035,000	Rp 34,504,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Inventarisasi dan Monev Propemperda (Koordinasi dengan Instansi Terkait)	TW IV	Laporan Hasil Inventarisasi dan Monev Propemperda	
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDH di Wilayah	Persentase Anggota JDH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDH di Wilayah	25%	Jumlah Anggota JDH yang Dikelola Dibagi Total Anggota JDH Dikali 100%	Melaksanakan Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan JDH di wilayah	Rp 25,809,000	Rp 25,809,000	Rp -	TW II	Melakukan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDH di wilayah	TW II	Laporan Monitoring dan Pendampingan Pengelolaan JDH	
12	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Jumlah Orang/Kelompok Miskin Yang Diberikan Bantuan Hukum Litigasi Dikanwil Dibagi Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Dikanwil Dikali 100%	Melaksanakan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Rp 2,400,000,000	Rp 500,000,000	Rp -	TW I	Melaksanakan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum dan Monitoring Pemberi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	TW I	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi	
						Rp 850,000,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum dan Monitoring Pemberi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	TW II	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi		
						Rp 900,000,000	Rp -	TW III	Melaksanakan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum dan Monitoring Pemberi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa	TW III	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi		
						Rp 150,000,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum dan Monitoring Pemberi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	TW IV	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi		
		Persentase Layanan bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi	80%	Jumlah Orang/Kelompok Miskin Yang Diberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Dikanwil Dibagi Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Dikanwil Dikali 100%	Melaksanakan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Rp 501,490,000	Rp 70,000,000	Rp -	TW I	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara serta Konsultasi Hukum	TW I	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi	
						Rp 182,490,000	Rp -	TW II	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara serta Konsultasi Hukum	TW II	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi		
						Rp 180,000,000	Rp -	TW III	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara serta Konsultasi Hukum	TW III	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi		
						Rp 69,000,000	Rp -	TW IV	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara serta Konsultasi Hukum	TW IV	Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi		
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Jumlah Desa/Kelurahan Binaan yang Dikukuhkan Dibagi Jumlah Usulan Desa/Kelurahan Binaan dari Masing-Masing Kantor Wilayah Dikali 100%	Pembinaan/Pembentukan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Binaan	Rp 109,845,000	Rp 24,320,000	Rp -	TW I	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW I	Surat Usulan Penyampaian Usulan Desa/Kelurahan yang Akan Dijadikan Desa/Kelurahan Binaan di Setiap Wilayah	
						Rp 29,350,000	Rp -	TW II	Pembinaan/Pembentukan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Binaan	TW II	SK dan Laporan Pembentukan Kelompok Kadarkum		
						Rp 2,380,000	Rp -	TW III	Pembentukan Kelompok Kadarkum, Penyusunan SK, dan Evaluasi Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW III	SK dan Laporan Pembentukan Kelompok Kadarkum		
						Rp 53,795,000	Rp -	TW IV	Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW IV	Laporan Akhir Capaian Target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan di Wilayah		



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
14	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang Dimanfaatkan/Dibagi Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang Dihasilkan pada Tahun Berjalan Dikali 100%	1. Analisis Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM 4. Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah; 5. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 319,267,000	Rp 85,040,000	Rp -	TW I	- Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemda - Penyusunan Laporan Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	TW I	- Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemda - Laporan Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	
						Rp 137,912,000	Rp -	TW II	- Pendampingan dan Verifikasi Awal Unggahan Data Dukung dari Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum	TW II	Laporan hasil pembinaan dan pendampingan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemda		
						Rp 69,625,000	Rp -	TW III	- Penyusunan laporan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) disertai daftar inventaris masalah dan rencana tindak - Evaluasi pelaksanaan kegiatan Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM - Penyusunan kompilasi Laporan Hasil SPKP-SPAK seluruh Satker di wilayah	TW III	- Laporan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) disertai daftar inventaris masalah dan rencana tindak - Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM - Kompilasi Laporan Hasil SPKP-SPAK seluruh Satker di wilayah		
						Rp 26,690,000	Rp -	TW IV	- Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum - Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui Opini Kebijakan dilaksanakan secara virtual	TW IV	- Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum - Laporan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM		
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>													
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	83 Indeks	Nilai Rata-Rata dari Penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Melaksanakan Bintorwasdal terhadap Pelayanan Pemasarakatan pada Satuan Kerja	Rp 642,927,000	Rp 208,979,000	Rp -	TW I	- Melaksanakan Koordinasi Teknis Pemasarakatan Terkait Aturan Maupun Edaran Terbaru Guna Peningkatan Layanan - Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasarakatan terkait Sistem Kerja PK dan APK pada Lapas/Rutan serta Hasil Kajian dan Urgensi pelaksanaan Litmas Online - Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan	TW I	- Laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasarakatan - Laporan Koordinasi Teknis Pemasarakatan - Laporan Rakernispas	
						Rp 283,045,000	Rp -	TW II	- Melaksanakan Koordinasi Teknis Pemasarakatan Terkait Aturan Maupun Edaran Terbaru Guna Peningkatan Layanan - Melaksanakan Dikunjapkol - Melaksanakan Bimtek Watkesrehab - Melaksanakan Bintorwasdal/Monev terkait Unit Layanan Pemasarakatan pada Satker Pemasarakatan - Melaksanakan Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi bagi Petugas Pemasarakatan - Melaksanakan kegiatan Pameran Hasil Karya Narapidana	TW II	- Laporan Koordinasi Teknis Pemasarakatan - Laporan Dikunjapkol - Laporan Bimtek - Laporan Bintorwasdal		
						Rp 124,683,000	Rp -	TW III	- Melaksanakan Koordinasi Teknis Pemasarakatan Terkait Aturan Maupun Edaran Terbaru Guna Peningkatan Layanan - Melaksanakan Kegiatan FMD - Melaksanakan Bintorwasdal/Monev terkait Unit Layanan Pemasarakatan pada Satker Pemasarakatan - Melaksanakan Koordinasi Teknis Pemasarakatan Terkait Aturan Maupun Edaran Terbaru Guna Peningkatan Layanan	TW III	- Laporan Laporan Koordinasi Teknis Pemasarakatan - Laporan Pelaksanaan hasil kegiatan FMD - Laporan Bintorwasdal		
						Rp 26,220,000	Rp -	TW IV	- Melaksanakan Bintorwasdal/Monev terkait Unit Layanan Pemasarakatan pada Satker Pemasarakatan - Melaksanakan Koordinasi Teknis Pemasarakatan Terkait Aturan Maupun Edaran Terbaru Guna Peningkatan Layanan	TW IV	- Laporan Bintorwasdal - Laporan Koordinasi Teknis Pemasarakatan		
16	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar	85%	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Terhadap Lapas/Rutan/LPKA agar Terpenuhinya Layanan Makanan pada Tahanan dan WBP	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW I	Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA	
						Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW II	Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA		
						Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW III	Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA		
						Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas/Rutan/LPKA Secara Berkala	TW IV	Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA		
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100%	Melakukan pengawasan terhadap Lapas/Rutan/Lpka agar terpenuhinya layanan kesehatan yang merata pada Tahanan dan WBP	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW I	Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA		
					Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW II	Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW III	Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA			
					Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP	TW IV	Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA			
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%	Jumlah Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%	Melakukan Monitoring pada Lapas yang Memiliki Tahanan/WBP Hamil dan Menyusui	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan	TW I	Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan			
				Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan	TW II	Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan	TW III		Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring terhadap Jumlah Tahanan dan WBP yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan	TW IV		Laporan BINTORWASDAL terhadap Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Perempuan yang Hamil dan Menyusui dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan mental dikali 100%	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW I		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW II		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW III		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW IV		Laporan Data Tahanan/Anak binaan/Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada Lapas/Rutan/LPKA
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka terhadap Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW I		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA
							Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW II		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW III		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan	TW IV		Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW I		Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW II		Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW III		Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	TW IV		Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	90%	Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $[(A + B) : 2] \times 100\%$	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka yang Melakukan Penangan Penyakit Menular	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW I		Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular
							Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW II		Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW III		Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW IV		Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan	29%	Jumlah Perubahan Kualitas Hidup Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Dibagi	Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Rehabilitasi yang Dilaksanakan oleh Lapas Narkotika kepada	Rp 51,105,000	Rp 14,385,000	Rp -	TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW I		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
							Rp 14,935,000	Rp -	TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW II		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
							Rp 15,925,000	Rp -	TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW III		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
							Rp 5,860,000	Rp -	TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	TW IV		Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
17	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	100%	Jumlah Tahanan <i>Overstaying</i> dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Jumlah Tahanan <i>Overstaying</i> pada Lapas/Rutan/LPKA	Rp 17,480,000	Rp 4,370,000	Rp -	TW I	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW I		Dokumen Hasil Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan
							Rp 4,370,000	Rp -	TW II	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW II		Dokumen Hasil Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan
							Rp 4,370,000	Rp -	TW III	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW III		Dokumen Hasil Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan
							Rp 4,370,000	Rp -	TW IV	Melakukan Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan	TW IV		Dokumen Hasil Penghitungan pada Jumlah Data Tahanan yang Sudah Lewat Masa Penahanannya dan Tidak atau Belum Ada Perpanjangan Penahanan
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Dibagi dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan pada Lapas/Rutan/Lpka terhadap Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Rp 17,480,000	Rp 4,370,000	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW I		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW II		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW III		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	TW IV		Laporan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum Dibagi dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Rp 17,480,000	Rp 4,370,000	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW I		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW II		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW III		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
							Rp 4,370,000	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring Data pada Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	TW IV		Laporan Monitoring Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
18	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Dibagi dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	Meningkatkan Peran Serta Wali Masyarakat atau Asesor Melalui Program Penilaian Layanan Kepribadian Secara Maksimal	Rp 76,978,000	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I		-
							Rp 76,978,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Bimtek Pembinaan (SPPN)	TW II		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek
							Rp -	Rp -	TW III	-	TW III		-
							Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV		-
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	Memberikan Layanan pemberian Hak Remisi kepada WBP sesuai standar di Lapas/LPKA/Rutan	Rp 79,152,334	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I		-
							Rp -	Rp -	TW II	-	TW II		-
							Rp 79,152,334	Rp -	TW III	Melaksanakan Bimtek Remisi guna peningkatan SDM Operator SDP	TW III		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek
							Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV		-
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	Memberikan Layanan pemberian Hak Integrasi (PB, CMB, CB, dan Asimilasi) kepada WBP sesuai standar	Rp 79,152,333	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I		-
							Rp -	Rp -	TW II	-	TW II		-
							Rp 79,152,333	Rp -	TW III	Melaksanakan Bimtek Integrasi bagi Petugas Masyarakat	TW III		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek
							Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV		-
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal Dikali 100%	Memenuhi Hak Pendidikan Formal bagi Narapidana	Rp 10,586,672	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait hak Pendidikan Formal (Kejar Paket) bagi Narapidana	TW I		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait hak Pendidikan Formal (Kejar Paket) bagi Narapidana	TW II		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait hak Pendidikan Formal (Kejar Paket) bagi Narapidana	TW III		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait hak Pendidikan Formal (Kejar Paket) bagi Narapidana	TW IV		Laporan Movev
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan Pendampingan dan Pembimbingan atau Konseling kepada Narapidana	Rp 10,586,672	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait fungsi Bapas untuk melakukan Pendampingan dan Pembimbingan atau Konseling sejak awal kepada Narapidana berdasarkan Penilaian penentuan kategori ( <i>High Risk</i> )	TW I		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait fungsi Bapas untuk melakukan Pendampingan dan Pembimbingan atau Konseling sejak awal kepada Narapidana berdasarkan Penilaian penentuan kategori ( <i>High Risk</i> )	TW II		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait fungsi Bapas untuk melakukan Pendampingan dan Pembimbingan atau Konseling sejak awal kepada Narapidana berdasarkan Penilaian penentuan kategori ( <i>High Risk</i> )	TW III		Laporan Movev
							Rp 2,646,668	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait fungsi Bapas untuk melakukan Pendampingan dan Pembimbingan atau Konseling sejak awal kepada Narapidana berdasarkan Penilaian penentuan kategori ( <i>High Risk</i> )	TW IV		Laporan Movev

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat	34%	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	Monitoring dan Evaluasi terkait Pendidikan Keterampilan Bersertifikasi bagi Narapidana	Rp 10,586,672	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Pemasarakatan dan Berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama (Balai Latihan Kerja) terkait Pelatihan Keterampilan Bbersertifikasi bagi Narapidana	TW I	Laporan Movev		
							Rp 2,646,668	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Pemasarakatan dan Berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama (Balai Latihan Kerja) terkait Pelatihan Keterampilan Bbersertifikasi bagi Narapidana	TW II	Laporan Movev		
							Rp 2,646,668	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Pemasarakatan dan Berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama (Balai Latihan Kerja) terkait Pelatihan Keterampilan Bbersertifikasi bagi Narapidana	TW III	Laporan Movev		
							Rp 2,646,668	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Pemasarakatan dan Berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama (Balai Latihan Kerja) terkait Pelatihan Keterampilan Bbersertifikasi bagi Narapidana	TW IV	Laporan Movev		
		Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	77%	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif Dibagi Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%	Meningkatkan Kompetensi SDM Petugas Pemasarakatan	Rp 95,261,000	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-		
						Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-			
						Rp 95,261,000	Rp -	TW III	Melaksanakan Bimtek Giatja	TW III	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek			
						Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV	-			
19	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%	Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran Dibagi dengan Jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran Dikali 100%	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Basan Baran Khususnya Pemeliharaan dan Penempatan	Rp 900,000	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-		
							Rp 450,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Basan Baran Khususnya Pemeliharaan dan Penempatan	TW II	Laporan Movev Basan Baran		
							Rp -	Rp -	TW III	-	TW III	-		
		Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	100%	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Eksekusi Dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap) Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Proses Pengeluaran Benda Sitaan dan Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	Rp 900,000	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-		
						Rp 450,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Basan Baran yang telah Memiliki Kekuatan Tetap	TW II	Laporan Movev Basan Baran			
						Rp -	Rp -	TW III	-	TW III	-			
							Rp 900,000	Rp 450,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Basan Baran yang telah Memiliki Kekuatan Tetap	TW IV	Laporan Movev Basan Baran	
								Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-	
								Rp 450,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Basan Baran yang telah Memiliki Kekuatan Tetap	TW II	Laporan Movev Basan Baran	
	20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100%	1. Verifikasi Pengaduan yang Masuk 2. Melakukan Pemeriksaan 3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rp 29,600,000	Rp 10,280,000	Rp -	TW I	1. Melaksanakan Verifikasi Terhadap Pengaduan yang Masuk 2. Menindaklanjuti Pengaduan yang Telah Terverifikasi dengan Cara Melakukan Pemeriksaan Bagi Pihak dalam Aduan dan Saksi 3. Memberikan Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan	TW I	Laporan BAP	
								Rp 4,830,000	Rp -	TW II	1. Melaksanakan Verifikasi Terhadap Pengaduan yang Masuk 2. Menindaklanjuti Pengaduan yang Telah Terverifikasi dengan Cara Melakukan Pemeriksaan Bagi Pihak dalam Aduan dan Saksi 3. Memberikan Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan	TW II	Laporan BAP	
								Rp 9,660,000	Rp -	TW III	1. Melaksanakan Verifikasi Terhadap Pengaduan yang Masuk 2. Menindaklanjuti Pengaduan yang Telah Terverifikasi dengan Cara Melakukan Pemeriksaan Bagi Pihak dalam Aduan dan Saksi 3. Memberikan Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan	TW III	Laporan BAP	
Rp 4,830,000								Rp -	TW IV	1. Melaksanakan Verifikasi Terhadap Pengaduan yang Masuk 2. Menindaklanjuti Pengaduan yang Telah Terverifikasi dengan Cara Melakukan Pemeriksaan Bagi Pihak dalam Aduan dan Saksi 3. Memberikan Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan	TW IV	Laporan BAP		
Rp -								Rp -	TW I	-	TW I	-		
Rp -								Rp -	TW II	-	TW II	-		
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah			90%	Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Dibagi Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib yang Terjadi Dikali 100%	Sidak dan Pengeledahan pada Lapas/Rutan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan pada Lapas/Rutan	Rp 108,220,000	Rp 16,100,000	Rp -	TW I	Melaksanakan Sidak dan Pengeledahan pada Lapas/Rutan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan pada Lapas/Rutan	TW I	Laporan Sidak		
						Rp 36,510,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Sidak dan Pengeledahan pada Lapas/Rutan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan pada Lapas/Rutan	TW II	Laporan Sidak			
						Rp 36,510,000	Rp -	TW III	Melaksanakan Sidak dan Pengeledahan pada Lapas/Rutan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan pada Lapas/Rutan	TW III	Laporan Sidak			
						Rp 19,100,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Sidak dan Pengeledahan pada Lapas/Rutan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan pada Lapas/Rutan	TW IV	Laporan Sidak			
						Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-			
						Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-			
					Mendistribusikan WBP Guna Mengurangi Tingkat Overkapasitas yang Terjadi dan Melakukan Pemindahan bagi Narapidana yang Beresiko Tinggi Ke Lapas yang Sesuai	Rp 66,524,000	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-		
						Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-			
						Rp -	Rp -	TW III	-	TW III	-			
						Rp 66,524,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Pendistribusian WBP Guna Mengurangi Tingkat Overkapasitas yang Terjadi dan Melakukan Pemindahan bagi Narapidana yang Beresiko Tinggi Ke Lapas yang Sesuai	TW IV	Laporan Deteksi Dini			
						Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-			
						Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-			
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukuman bagi Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Rp 9,660,000	Rp -	Rp -	TW I	Melaksanakan Sidak	TW I	Laporan Kegiatan Pengawasan			
					Rp 4,830,000	Rp -	TW II	Melaksanakan Sidak	TW II	Laporan Kegiatan Pengawasan				
					Rp -	Rp -	TW III	Melaksanakan Sidak	TW III	Laporan Kegiatan Pengawasan				
					Rp 4,830,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Sidak	TW IV	Laporan Kegiatan Pengawasan				
					Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-				
					Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-				
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	Pemantauan Penyelenggaraan Rekonstruksi Proses Pemulihan	Rp 6,319,000	Rp -	Rp -	TW I	Melaksanakan Sidak	TW I	Laporan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib			
					Rp -	Rp -	TW II	Melaksanakan Sidak	TW II	Laporan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib				
					Rp -	Rp -	TW III	Melaksanakan Sidak	TW III	Laporan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib				
					Rp 6,319,000	Rp -	TW IV	Melaksanakan Sidak	TW IV	Laporan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib				
					Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-				
					Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
21	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali 100%	Memberikan Pembinaan Pelatihan Kerja pada Klien	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Dewasa untuk Mendapatkan Pekerjaan	TW I	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Dewasa untuk Mendapatkan Pekerjaan	TW II	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Dewasa untuk Mendapatkan Pekerjaan	TW III	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Dewasa untuk Mendapatkan Pekerjaan	TW IV	Laporan Movev	
	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Dibagi Jumlah Pendampingan Anak Dikali 100%	Memaksimalkan Fungsi Bapas untuk Melakukan Pendampingan dan Pembimbingan Sejak Awal Persidangan ABH/Klien Anak	Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pembimbingan Sejak Awal Persidangan ABH/Klien Anak	TW I	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pembimbingan Sejak Awal Persidangan ABH/Klien Anak	TW II	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pembimbingan Sejak Awal Persidangan ABH/Klien Anak	TW III	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pembimbingan Sejak Awal Persidangan ABH/Klien Anak	TW IV	Laporan Movev	
	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali 100%	Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	TW I	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	TW II	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	TW III	Laporan Movev	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Fungsi Bapas dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Untuk Meneruskan Pendidikan	TW IV	Laporan Movev	
22	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil Dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	Monitoring dan Evaluasi terkait Pendidikan Keterampilan Bersertifikasi bagi Anak	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW I	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW II	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW III	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW IV	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Dibagi Jumlah Anak yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	Memberikan Layanan Hak Integrasi (PB, CB) Sesuai Standar	Memberikan Layanan Hak Integrasi (PB, CB) Sesuai Standar	Rp 79,152,333	Rp -	Rp -	TW I	-	TW I	-	
							Rp -	Rp -	TW II	-	TW II	-	
							Rp 79,152,333	Rp -	TW III	Melaksanakan Bimtek Integrasi bagi Petugas Pemasyarakatan	TW III	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek	
							Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV	-	
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Optimalisasi Program Penilaian Layanan Kepribadian terhadap ABH	Optimalisasi Program Penilaian Layanan Kepribadian terhadap ABH	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW I	Laporan Movev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW II	Laporan Movev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW III	Laporan Movev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW IV	Laporan Movev Pendataan Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Optimalisasi terkait Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal untuk ABH.	Optimalisasi terkait Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal untuk ABH.	Rp 10,586,666	Rp 2,646,668	Rp -	TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW I	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW II	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW III	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	
							Rp 2,646,666	Rp -	TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW IV	Laporan Movev Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN		
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>															
23	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 Indeks	Survey IKM terhadap layanan keimigrasian dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Rp 1,107,294,000	Rp 324,429,141	Rp -	TW I	- Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo - Koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba - Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare) - Koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten Rantepao dan Enrekang, Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo.	TW I	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas			
							Rp 315,338,000	Rp -	TW II	- Konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi, - Koordinasi dengan Intansi terkait Kabupaten Watampone, - Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar) - Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar - Koordinasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta - Koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten Barru)	TW II	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas			
							Rp 315,568,598	Rp -	TW III	- Koordinasi instansi terkait Kabupaten Barru dan Pinrang, - Bindalwasnis ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar - Kegiatan Diseminasi - Koordinasi instansi terkait Kabupaten Watansoppeng - Bindalwasnis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	TW III	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Kegiatan Diseminasi			
							Rp 151,958,261	Rp -	TW IV	- Konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi - Kegiatan Diseminasi - Bindalwasnis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	TW IV	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Kegiatan Diseminasi			
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks	Perhitungan Menggunakan Metode Survey Berbasis Aplikasi yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Dengan Interval target 1,00 - 4,00	Melaksanakan Operasi Bidang Keamanan	Rp 460,127,000	Rp 233,774,500	Rp -	TW I	Operasi Intelijen, Operasi Mandiri di Wilayah, Operasi Gabungan di Wilayah, Pelaksanaan TIMPORA	TW I	Laporan Kegiatan Operasi Intelijen, Laporan Operasi Mandiri, Laporan Operasi Gabungan dan Pelaksanaan TIMPORA			
							Rp 26,111,500	Rp -	TW II	Operasi Mandiri di Wilayah	TW II	Laporan Operasi Mandiri			
							Rp 200,241,000	Rp -	TW III	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	TW III	Laporan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian			
							Rp -	Rp -	TW IV	-	TW IV	-			



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Liberti Sitinjak  
NIP 196407011991031001